

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KECAMATAN SIGALUH  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
KECAMATAN SIGALUH  
JI.Raya Sigaluh Km.10 Telp./Fax. (0286)591046  
SIGALUH-53481**

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP), sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 adalah merupakan kewajiban bagi setiap Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan LJKIP juga dalam rangka penyelenggaraan *good governance* serta memenuhi aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan bebas KKN, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh Wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan kondisi, potensi, perkembangan dan permasalahan serta tatanan masyarakat dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan didasari dengan keinginan luhur guna mewujudkan *good governance* maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) Kecamatan Sigaluh Tahun 2023 yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya.

LJKIP ini juga diharapkan dapat menjadi dasar dan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan baik di OPD Kecamatan Sigaluh, kami buat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sigaluh Tahun 2023.

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Sigaluh, menggunakan Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Sigaluh sebagai acuan dengan harapan dapat selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi, karena Perencanaan Strategis (Renstra) dan Pengukuran Kinerja merupakan rangkaian Sistem Akuntabilitas Kinerja yang sangat penting.

#### **A. GAMBARAN UMUM**

Kecamatan Sigaluh adalah salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Wilayah Kecamatan Sigaluh terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan, memiliki luas 3.955,95 km<sup>2</sup>, yaitu : Desa Sigaluh 3%, Singamerta 5%, Kelurahan Kalibenda 3%, Pringamba 10%, Sawal 17%, Panawaren 15%, Tunggara 5%, Randegan 3%, Bojanegara 5%, Bandingan 3%, Prigi 13%, Gembongan 7%, Kemiri 6% , Karangmangu 4% dan Wanacipta 1 %. Dengan jumlah penduduk pada Tahun 2021 sebanyak 36.671 jiwa. (Data penduduk : Aplikasi Sistem Aplikasi dan Kependudukan/SIAK).

Sebagian besar penduduk kecamatan Sigaluh bermata pencaharian sebagai petani/pekebun, dengan komoditas unggulannya adalah buah-buahan seperti durian , manggis, duku, dan salak. Kondisi tanah di wilayah kecamatan Sigaluh sebagian besar juga merupakan dataran yang bergelombang (berbukit-bukit) sehingga sangat cocok untuk daerah perkebunan dan wisata alam.

Untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Sigaluh mempunyai 22 (dua puluh dua) orang ASN ( termasuk ASN di Kelurahan Kalibenda), ditambah tenaga pendukung THL 3 orang.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan

yang mencakup Bidang Pemerintahan, Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat serta melaksanakan koordinasi terhadap Unit Perangkat Daerah yang ada di wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- d. Pembinaan dan fasilitasi bijakan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan serta kelurahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan dan ;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH**

Jumlah penduduk Kecamatan Sigaluh yang berjumlah 36.162 jiwa yang tersebar di 14 (empat belas ) desa dan 1 kelurahan merupakan potensi SDM yang dapat mendukung kemajuan pembangunan di wilayah Kecamatan Sigaluh. Mata pencaharian sebagian penduduk Kecamatan Sigaluh adalah dari sektor pertanian, baik milik sendiri, menyewa, maupun sebagai buruh. Dengan penyebaran sebagai berikut :

- a. Sektor perkebunan:
  - Buah-buahan (durian, salak, manggis, dan duku) yang tersebar hampir di semua desa
  - Jahe, kunyit, kencur , kapulaga didesa Tunggara , Panawaren , Randegan
  - Kayu kalbi, sengon dan mahoni Tunggara, Prigi, Panawaren, Randegan, dan Bojanegara
  - Kopi, aren di Desa Pringamba
- b. Sektor Peternakan:
  - Sapi di desa wanacipta,
  - Kambing tersebar di semua desa
  - Ayam di Desa Tunggara, Prigi, panawaren

- c. Sektor Pertambangan:
  - Batu dan pasir tersebar di Desa Randegan, Bojanegara, Sigaluh, Gembongan Singamerta, dan Prigi .
- d. Wisata Alam
  - Wisata Arung Jeram (Singamerta, Randegan, Bojanegara)
  - Wisata Curug Pitu (Desa Kemiri)
  - Wisata Curug Bolong (Desa Prigi)
  - Agro Wisata Salak (Desa Prigi)
  - Wisata Kolam Renang Cangkring (Desa Prigi)
  - Wisata Curug Kembang (Desa Tunggara)

## **B. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**

Analisa isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis organisasi Kecamatan Sigaluh.

Permasalahan atau isu dapat dilihat dari aspek pelayanan umum serta tugas pokok dan fungsi yaitu kinerja pelayanan kantor Kecamatan Sigaluh. Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Kecamatan secara garis besar meliputi bidang Pelayanan Publik, Mengkoordinir Urusan Pemerintahan di Wilayah dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan. Dari tiga bidang tersebut kemudian dilakukan analisis permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari internal kecamatan maupun eksternal kecamatan (pemerintah desa) kemudian dilakukan penentuan isu-isu strategis dengan penilaian (scoring) dari kriteria-kriteria permasalahan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra dan pelayanan publik. Dapat dirumuskan isu-isu strategis pada Kecamatan Sigaluh sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan tertib administrasi desa.
- b. Belum optimalnya peran pemerintah desa dalam memberdayakan BUMDES
- c. Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah desa dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban menyelesaikan urusan perpajakan tepat waktu .
- d. Belum terpenuhinya keterlibatan perempuan berpartisipasi dalam pembangunan .
- e. Belum optimalnya kemampuan perangkat desa dalam penatausahaan keuangan desa terkait dengan implementasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- f. Belum optimalnya kesadaran Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat (penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, keagamaan, dan ketertiban/keamanan)

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI**

##### **VISI DAN MISI**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026 dan RENSTRA Kecamatan Sigaluh Tahun 2023-2026.

Kecamatan Sigaluh menetapkan Rencana Strategis Tahun 2023-2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sigaluh dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2023-2026.

Reformasi pada sektor aparatur daerah pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis, dan berkelanjutan. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi **visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program** yang ingin diwujudkan.

**Visi** Kecamatan Sigaluh adalah Visi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017, yaitu:

##### **“BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”**

**Misi** Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Sigaluh adalah Misi Kedua dan Keempat yaitu :

1. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik.

Yakni dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, memperkuat komitmen untuk menciptakan good and clean goverment. Dengan Fokus peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui fokus yang pertama diharapkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih dekat dan transparan. Sedangkan melalui fokus yang kedua diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat.

2. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif , efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional.

Tata kelola keuangan merupakan salah satu aspek dalam good and clean goverment, diharapkan melalui misi ini pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, dan lebih mandiri dalam segi pembiayaan pembangunan.

## **TUJUAN.**

Tujuan dari masing-masing misi yang akan dicapai Kantor Kecamatan Sigaluh pada tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan efektifitas dan transparansi layanan publik
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
3. Meningkatkan kemandirian daerah

## **SASARAN**

Sasaran yang akan dicapai perangkat daerah Kecamatan Sigaluh dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari jadwal waktu yang sudah ditentukan. Dalam sasaran tersebut meliputi uraian sasaran dan indikator sasaran, uraian sasaran dan indikator kinerja sasaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sigaluh adalah:

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah

## **KEBIJAKAN**

Kebijakan sebagai Pedoman, pegangan dan petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran, tujuan, serta visi dan misi Instansi Pemerintah, mendasari hal tersebut maka kebijakan yang ditetapkan Kantor Kecamatan Sigaluh adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara prima dengan prosedur yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor ;
3. Mengoptimalkan pelayanan pembuatan E-KTP dan KK ;
4. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan yang baik ;
6. Meningkatkan pelaksanaan intensifikasi PBB kepada masyarakat secara optimal

## **PROGRAM.**

Program adalah kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah.

Adapun program kecamatan Sigaluh sesuai dengan kewenangan yang dimiliki adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara sebagaimana termuat dalam rencana strategis tahun 2023-2026 dimaksud.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Sigaluh Tahun 2023, sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik** dengan indikator nilai survey kepuasan masyarakat dengan target 83,97 pada tahun 2022. Sampai tahun 2023 Kecamatan Sigaluh menargetkan nilai survey kepuasan masyarakat sebesar 84,03.
2. **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah** dengan indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah dengan target nilai B.
3. **Meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah** dengan indikator kinerja jumlah SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan target 27.141 SPPT dengan nilai total pagu pajak bumi dan bangunan sesuai dengan SPT di Kecamatan Sigaluh sebesar Rp. 1.040.776.571,-, di tahun 2023 ditargetkan lunas semua.

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas pada tahun 2023 diwujudkan dalam 5 (lima) program dengan anggaran sebesar Rp. 3.679.798.659,-

Kecamatan Sigaluh pada tahun 2023 melaksanakan kegiatan yang terdiri 5 (lima) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Adapun rincian program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.** Terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan, yaitu :

**1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**Kegiatan** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target 22 orang sebesar Rp. 2.517.234.949,- terealisasi 22 Orang sebesar Rp. 2.392.368.164,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 95,04%.

2. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Tercukupinya Jumlah UP/GU/LS/TUP yang diuji dan diverifikasi, dengan target 7 orang sebesar Rp. 99.298.000,- terealisasi 7 Orang sebesar Rp. 95.288.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 95,96%.

3. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Tercukupinya Jumlah LK Bulanan/Triwulan/Semesteran dan disusun,, dengan target sebesar Rp. 14.300.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.700.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 81,82%.

**2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

**Kegiatan** Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor, dengan target anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- realisasi Rp. 7.500.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 100 %.

2. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Tersedianya bahan logistik kantor, dengan target anggaran Rp. 79.983.800,- terealisasi Rp. 74.012.655,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 92,53%.

### **3. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik  
Sub Kegiatan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Terpenuhinya pembayaran listrik dan air, dengan target Rp. 18.900.000,- terealisasi Rp. 9.283.649,- capaian kinerja sebesar 49,12%. Yang disebabkan untuk biaya komunikasi sudah tidak ada.
2. Sub kegiatan Penyedia jasa pelayanan umum kantor  
Sub Kegiatan Penyedia jasa pelayanan umum kantor mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu jumlah jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi, dengan target 3 orang sebesar Rp. 133.668.630,- terealisasi 3 orang sebesar Rp. 133.211.272,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 99,66%.

### **4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.**

**Kegiatan** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.  
Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan mempunyai 1 (satu) indikator keluaran,yaitu : terpeliharanya kendaraan dinas, dengan target 9 Unit sebesar Rp. 9.264.000,- terealisasi 9 unit sebesar Rp. 8.481.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 91,55%.
2. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.  
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai 1 (satu) indikator keluaran,yaitu : terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan target 2 paket sebesar Rp. 27.129.480,- terealisasi 2 paket sebesar Rp. 15.775.500,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 58,15%.
3. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya.  
Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : Terpeliharanya gedung kantor , dengan target 6 unit sebesar Rp. 31.319.800.- terealisasi 3 unit sebesar Rp. 12.336.700,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 39,39%.

**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang Dilimpahkan kepada Camat

**Kegiatan** Pelaksanaan Urusan Pemerintahaan yang Dilimpahkan kepada Camat didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintahaan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sub Kegiatan pelaksanaan urusan Pemerintahaan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan mempunyai 1 (satu) indikator keluaran, yaitu : jumlah distribusi SPPT PBB, dengan target 100% (27.141 SPPT) kegiatan terealisasi 100 %.

Kecamatan Sigaluh Tahun 2023 mempunyai baku PBB Rp. 1.040.776.571,- Realisasi sampai dengan akhir Desember 2023 Rp. 1.004.718.040,- (96,53%) Sisa piutang 2023 Rp. 36.058.531,-

**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.

**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub kegiatan Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan.

Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, dengan target sebesar Rp. 491.386.000.- terealisasi sebesar Rp. 467.139.250,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 95,07%.

2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah tercapainya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan target Rp. 125.614.000,- terealisasi Rp. 120.355.200,- sehingga mempunyai capaian kinerja 95,81%

**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

**Kegiatan** Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan

Sub Kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan mempunyai 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu : jumlah laporan koordinasi pimpinan

di Kecamatan, dengan target 12 kali kegiatan sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi 12 kali kegiatan sebesar Rp. 12.700.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 84,67%.

### **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** didukung oleh

1 (satu) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

**Kegiatan** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa didukung oleh 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu :

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa , dengan target 14 desa sebesar Rp. 7.200.000,- dan terealisasi 14 desa sebesar Rp. 5.025.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 69,79%.
2. Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu terfasilitasinya administrasi pemerintahan desa yang terlaksana , dengan target 14 desa sebesar Rp. 7.200.000,- dan terealisasi 14 desa sebesar Rp. 5.100.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 70,83%.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dengan 1 ( satu ) indikator keluaran, yaitu terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, dengan target 14 desa sebesar Rp. 7.200.000,- dan terealisasi 14 desa sebesar Rp. 3.975.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 55,21%.
4. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu terpenuhinya fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat desa, dengan target 14 desa sebesar Rp. 7.200.000,- terealisasi 14 desa sebesar Rp. 4.400.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 61,11%.
5. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat desa, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu terpenuhinya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa, dengan target 14 desa sebesar Rp. 7.200.000,- terealisasi 14 desa sebesar Rp. 6.950.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 96,53%.
6. Sub kegiatan Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, dengan 1 (satu) indikator keluaran, yaitu terlaksananya Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya dengan target 14 desa sebesar Rp. 7.200.000,- terealisasi 14 desa sebesar Rp. 6.475.000,- sehingga mempunyai capaian kinerja sebesar 89,93%.

### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Sigaluh merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Sigaluh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Kecamatan Sigaluh Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan danlam dokume Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Perhitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

| No | Kategori | Nilai angka | Interpretasi   |
|----|----------|-------------|--|
| 1  | AA       | ➢ 90 - 100  | Sangat Memuaskan   |
| 2  | A        | ➢ 80 - 90   | Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel   |
| 3  | BB       | ➢ 70 - 80   | Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem menejemen kinerja yang andal  |
| 4  | B        | ➢ 60 - 70   | Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk menejemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan |

|   |    |           |   |
|---|----|-----------|---|
| 5 | CC | ➤ 50 - 60 | Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar |
| 6 | C  | ➤ 30 - 50 | Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk menejemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan mendasar  |
| 7 | D  | ➤ 0 - 30  | Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.  |

Capaian kinerja Kecamatan Sigaluh sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Kecamatan Sigaluh Tahun 2023-2026 ada 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu :

| <b>Sasaran</b>  | <b>Indikator</b>              | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> |
|---|-------------------------------|---------------|------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik                  | Nilai SKM                     | 85,16         | 84,03            |
|   | Persentase Pembagian SPPT PBB | 100           | 100              |
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Nilai Sakip                   | CC            | B                |

Adapun rincian penjelasan pencapaian per Sasaran dan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

| Sasaran 1: | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |
|------------|--|
|------------|--|

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pendayagunaan aparatur negara bidang pelayanan publik melalui Kemenpan Nomor. 81/1995 yang menyebutkan bahwa layanan prima adalah layanan yang memberikan kepuasan pelanggan, serta peraturanMenpan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kebijakan ini dalam merespon tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat.

Oleh karena itu pengukuran secara periodik Indeks Kepuasan Masyarakat adalah jawaban yang tepat untuk mengevaluasi sejauh mana OPD tersebut dalam memberikan pelayanan prima secara langsung kepada masyarakat.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, dilakukan pengukuran kinerja melalui 1 (satu) indikator kinerja, adapun realisasi dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut

| Indikator Kinerja                  | Target | Realisasi | %     |
|------------------------------------|--------|-----------|-------|
| - Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 85,16  | 84,03     | 98,67 |

Realisasi kinerja pada sasaran 1 yang telah ditargetkan dalam Tahun 2022 telah tercapai capaian 98,55%.

Nilai survey kepuasan masyarakat tersebut diperoleh dari hasil perhitungan survey kepuasan masyarakat sebagai berikut :

| No               | Unsur Pelayanan           | Nilai Rata Rata Unsur Pelayanan | Kinerja Unsur Pelayanan |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1                | Pesyaratan Pelayanan      | 3,37                            | Sangat Baik             |
| 2                | Prosedur Pelayanan        | 3,23                            | Sangat Baik             |
| 3                | Waktu Pelayanan           | 3,40                            | Sangat Baik             |
| 4                | Biaya / tarif             | 3.90                            | Sangat Baik             |
| 5                | Produk Layanan            | 3,31                            | Sangat Baik             |
| 6                | Kompetensi Pelaksana      | 3,39                            | Sangat Baik             |
| 7                | Perilaku Pelaksana        | 3,20                            | Sangat Baik             |
| 8                | Kualitas Sarana Prasarana | 2,98                            | Sangat Baik             |
| 9                | Penanganan Pengaduan      | 3,47                            | Sangat Baik             |
| <b>Nilai IKM</b> |                           | <b>84,03</b>                    | <b>Sangat Baik</b>      |

Dari hasil survey terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan tersebut rata-rata mempunyai nilai Sangat Baik. Di antara 9 unsur yang dinilai, kualitas sarana dan prasarana memiliki nilai yang paling rendah meskipun di level Sangat Baik. Hal ini menjadi pemicu

agar di tahun depan kecamatan bisa melayani masyarakat dengan sarana dan prasarana yang lebih baik.

Capaian kinerja di atas apabila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya diperoleh gambaran sebagai berikut:

| INDIKATOR KINERJA                | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | 81,13 | 85,16 | 83,11 | 83,97 | 84,03 |

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA                | TARGET<br>2023 | REALISASI<br>2023 | CAPAIAN<br>(%) |
|----------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Nilai survey kepuasan masyarakat | 85,20          | 84,03             | 98,67          |

Dari data di atas untuk capaian indikator kinerja nilai survey kepuasan masyarakat apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Sigaluh dengan target 85,20, pada tahun 2023 sudah tercapai 84.03 atau sebesar 98,67%.

Keberhasilan capaian kinerja didukung antara lain :

1. Adanya komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang didukung dengan anggaran yang cukup memadai
2. Peningkatan mutu pelayanan oleh Aparatur Kecamatan
3. Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara Aparatur Kecamatan dengan pihak terkait ( Forkompinca, UPT, Pemerintah Desa, dan Masyarakat pada umumnya);
4. Komitmen dari semua seksi untuk melaksanakan pelayanan secara optimal.

**Hambatan dan kendala** yang dihadapi dalam pencapaian sasaran 1 (satu) adalah respon pihak terkait dalam mengisi kuisioner SKM yang lambat, menyebabkan rekapitulasi nilai IKM juga lambat.

**Alternatif solusi** yang telah dilakukan untuk pencapaian target selanjutnya adalah dengan menyebarkan kuisioner di samping kepada masyarakat yang datang juga dititipkan melalui perangkat desa.

**Analisis Realisasi sumber daya keuangan** untuk pencapaian sasaran 1 (satu) adalah sebesar Rp. 3.453.871.390,- atau 93,86 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.679.798.659,-

Pada sasaran 1, Indikator kinerja nilai Survey Kepuasan Masyarakat dicapai melalui 5 (lima) program dan 9 (sembilan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan.. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) kegiatan dan 12

(duabelas) sub kegiatan. Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 49,12 %, hal ini dikarenakan pembayaran rekening listrik dan rekening telepon besarnya disesuaikan dengan tagihan. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi Keuangan sebesar 99,66 %, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 100%, Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 92,53%, hal ini dikarenakan ada efisiensi pada belanja perjalanan dinas dalam daerah. dan pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dengan realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi keuangan sebesar 95,96%.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan, dengan realisasi fisik 100%, realisasi keuangan 91,55%. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 58,15%, sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 39,39%. Hal ini disebabkan rehabilitasi sarana dan prasarana yang direncanakan akan dilaksanakan, kenyataannya masih bisa didayagunakan. Sehingga belum perlu untuk diadakan rehabilitasi.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 95,22%. Dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar 73,90%.

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>SASARAN 2 :</b> | <b>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b> |
|--------------------|--|

Pemerintahan yang akuntabel diwujudkan dengan kesinambungan antara dokumen perencanaan kinerja, pengkuran kinerja, pelaporan kinerja, evalausi internal dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi. Keseluruhan unsur tersebut dilakukan evaluasi secara keseluruhan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara sebagai pelaksana dalam mengawal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penilaian mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan ekonomis. Adapun kriteria hasil evaluasi terlihat pada tabel berikut:

### **Predikat Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

| <b>No</b> | <b>Predikat</b> | <b>Nilai Absolut</b> | <b>Interpretasi</b> |
|-----------|-----------------|----------------------|---------------------|
| 1         | AA              | >85 -100             | Sangat Memuaskan    |
| 2         | A               | >75 – 85             | Memuaskan           |
| 3         | B               | >65 – 75             | Baik                |
| 4         | CC              | >50 – 65             | Cukup               |
| 5         | C               | >30 – 50             | Kurang              |
| 6         | D               | 0 – 30               | Sangat Kurang       |

Penilaian dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan target kinerja;
2. Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja;
3. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan;
4. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
5. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, dilakukan pengukuran kinerja melalui 1 (satu) indikator kinerja, adapun realisasi dari indikator kinerja ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**- INDIKATOR KINERJA Nilai SAKIP Perangkat Daerah**

- a. Apabila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, pada indikator kinerja Nilai Sakip perangkat daerah tercapai dengan angka 50,25, dapat digambarkan sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA            | TARGET        | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|------------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Nilai SAKIP perangkat daerah | CC (>50 – 65) | 62,10     | 95,53       |

Dari data di atas untuk capaian indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah pada tahun 2022 dengan target nilai 51,00 berdasarkan evaluasi dan review dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara kecamatan Sigaluh mendapatkan nilai 62,10 dengan rincian sebagai berikut:

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | BOBOT (%) | HASIL PENILAIAN |
|----|-----------------------|-----------|-----------------|
| 1  | Perencanaan Kinerja   | 30        | 19,80           |
| 2  | Pengukuran Kinerja    | 30        | 18,00           |
| 3  | Pelaporan Kinerja     | 15        | 9,30            |

|   |                           |             |              |
|---|---------------------------|-------------|--------------|
| 4 | Evaluasi Kinerja Internal | 25          | 15,00        |
|   | Hasil Evaluasi            | <b>100%</b> | <b>62,10</b> |

- b. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:

| INDIKATOR KINERJA            | REALISASI |       |       |       |       |
|------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
|                              | 2019      | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Nilai SAKIP perangkat daerah | 53,26     | 53,56 | 55,70 | 50,25 | 62,10 |

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan menurun mulai dari nilai CC dan 50,25 pada tahun 2022. Menjadi 62,10 pada tahun 2023.

- c. Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat digambarkan sebagai berikut:

| INDIKATOR KINERJA            | TARGET<br>2023 | REALISASI<br>2023 | CAPAIAN<br>(%) |
|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Nilai SAKIP perangkat daerah | B (66)         | 62,10 (B)         | 94,09          |

Dari data di atas untuk capaian indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Sigaluh yaitu B, pada tahun 2023 sudah mencapai 62,10 atau sudah tercapai 94,09%, dengan catatan masih perlu banyak perbaikan dan peningkatan kinerja.

- d. Untuk mencapai nilai SAKIP yang baik ini harus menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :
1. Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.
  2. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator

kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.
4. Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.
5. Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.
6. Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Rreviu tersebut dilaksanakan oleh Aparat pengawasan intern pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat pengawasan intern pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi pemerintah.
  - a. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat digambarkan bahwa indikator nilai SAKIP perangkat daerah ini dicapai melalui :
    - Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
    - Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
    - Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
    - Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian indikator adalah sebagai berikut :

| <b>Indikator Sasaran</b>                                | <b>Program/Kegiatan</b>   |
|---|---|
| Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b> |
|   | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD      |

Dari program maupun kegiatan yang ada pada Sasaran 2, masing-masing realisasi keuangan dan fisik (berdasarkan capaian output kegiatan) dapat dicermati melalui tabel berikut:

| Program/Kegiatan   | Anggaran<br>(Rp) | Realiasasi<br>(Rp) | Keuangan<br>% | Fisik<br>% |
|--|------------------|--------------------|---------------|------------|
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan   |                  |                    |               |            |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | 1.500.000        | 245.000            | 16,33         | 100        |

- b. Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dicapai melalui :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1 (satu) kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD yang outputnya berupa laporan realisasi capaian kinerja dan keuangan SKPD, realisasi keuangan 16,33% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan Sigaluh, pada Tahun Anggaran 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.679.798.659,- yang bersumber dari APBD. Komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.517.234.949,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.162.563.710,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**PER. 31 DESEMBER 2023**  
**KECAMATAN SIGALUH**

| No            | Sasaran  | Program/ kegiatan   | Anggaran (Rp)        | Realisasi            | %            |
|---------------|--|---|----------------------|----------------------|--------------|
|               |  |   |                      | (Rp)                 |              |
| 1.            | Meningkatnya Kwalitas Pelayanan Publik                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 1.500.000            | 245.000              | 16,33        |
|               |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                             | 1.500.000            | 245.000              | 16,33        |
|               |  | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.517.234.949        | 2.392.368.164        | 95,64        |
|               |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD   | 99.298.000           | 95.288.000           | 95,96        |
|               |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                                       | 14.300.000           | 11.700.000           | 81,82        |
|               |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 7.500.000            | 7.500.000            | 100          |
|               |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 79.983.800           | 74.012.655           | 92,53        |
|               |  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  | 18.900.000           | 9.283.649            | 49,12        |
|               |  | Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 133.668.630          | 133.211.272          | 99,66        |
|               |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 9.264.000            | 8.481.000            | 91,55        |
|               |  | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainya   | 27.129.480           | 15.775.500           | 58,15        |
|               |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                      | 31.319.800           | 12.336.700           | 39,39        |
|               |  | Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan  | 491.386.000          | 467.139.250          | 95,07        |
|               |  | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 125.614.000          | 120.355.200          | 95,81        |
|               |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa  | 7.200.000            | 5.025.000            | 69,79        |
|               |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa  | 7.200.000            | 5.100.000            | 70,83        |
|               |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa  | 7.200.000            | 3.975.000            | 55,21        |
|               |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | 7.200.000            | 4.400.000            | 61,11        |
|               |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa  | 7.200.000            | 6.950.000            | 96,53        |
|               |  | Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya  | 7.200.000            | 6.475.000            | 89,93        |
|               |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan                              | 63.000.000           | 61.305.000           | 97,31        |
| 2.            | Meningkatnya Kwalitas Penyelenggaraan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 15.000.000           | 12.700.000           | 84,67        |
| <b>JUMLAH</b> |  |   | <b>3.679.798.659</b> | <b>3.453.871.390</b> | <b>93,86</b> |

Dilihat dari realisasi anggaran, untuk Belanja Langsung penyerapan anggaran Tahun 2023 mencapai 93,86 %, atau anggaran sebesar Rp. 3.679.798.659,- realisasi sebesar Rp. 3.453.871.390,- Dari 22 (duapuluhan dua) sub kegiatan yang dikelola Kecamatan Sigaluh rata – rata realisasi anggarannya mencapai 88,98%. Ada beberapa sub kegiatan yang prosentase realisasi anggarannya di bawah 90%. Meliputi :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, realisasi 16,33%
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi 16,33%
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, realisasi 81,82%
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi 49,12%
5. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi 58,15%
6. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasi 39,39%
7. Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan, realisasi 84,67%
8. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, realisasi 69,79%
9. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa, realisasi 70,83%
10. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, realisasi 55,21%
11. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, realisasi 61,11%
12. Sub Kegiatan Fasilitasi Pendampingan Desa di Wilayahnya, realisasi 89,93%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Capaian Kinerja dari 3 (tiga) Sasaran Strategis Kecamatan Sigaluh tahun 20212 dengan masing-masing capaian sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat, dengan target kinerja mendapatkan skor atau nilai 85,20 dari survey kepuasan masyarakat. Hasil dari nilai survey kepuasan masyarakat, diperoleh nilai 84,03 atau prosentase capaian sebesar 98,67 %.

Pada sasaran indikator ini terdapat beberapa program dan kegiatan yang mendukung dalam tercapainya nilai SKM antara lain :

- a. Pelayanan Administrasi Kependudukan
- b. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- d. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
2. Sasaran Strategis terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja nilai SAKIP. Target kinerja tahun 2023 diharapkan memperoleh nilai CC dan hasil evaluasi dokumen SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara, Nilai SAKIP Kecamatan Sigaluh adalah 62,10 atau B (Baik), dengan persentase capaian kinerjanya adalah 95,53%. Pada sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Prosentase penyaluran SPPT PBB, dengan target Kinerja 100% tercapai 100%. Capaian kinerja tersebut didukung oleh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah, pada sasaran ini pada Tahun 2023.

Penjelasan di atas terangkum dalam tabel sebagai berikut:

| No                   | Indikator Kinerja                                   | Target (%) | Realisasi (%) |
|----------------------|---|------------|---------------|
| 1.                   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat                    | 100        | 98,67         |
| 2.                   | Nilai SAKIP   | 100        | 95,53         |
|                      | Prosentase SPPT PBB yang tersalurkan ke Wajib Pajak | 100        | 100           |
| <b>J u m l a h :</b> |   | <b>300</b> | <b>294,20</b> |

Dari data di atas bila dihitung menggunakan rumus :

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Maka } &= \frac{294,20}{300} \times 100\% \\ &= 98,07\end{aligned}$$

Dengan memperhatikan data tersebut di atas, maka dapat diketahui capaian kinerja Kecamatan Sigaluh Tahun 2023 tercapai dengan kategori Sangat Memuaskan dengan rata rata capaian sebesar 98,07%

Dalam melaksanakan program kerja selama tahun 2023 tentu saja terdapat hambatan-hambatan dan kami berusaha mencari solusi agar hambatan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas. Adapun hambatan tersebut serta langkah antisipatif dan korektif yang ditempuh dalam rangka mengatasi hambatan antara lain :

**Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran :**

1. Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Kecamatan Sigaluh ada sebagian yang tidak memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan sehingga mempengaruhi kecepatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Adanya sarana dan prasarana, juga tata ruang kantor yang tidak memenuhi standar pelayanan.

**Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh dalam rangka mensiasati kekurangan keberhasilan pencapaian sasaran antara lain :**

1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan cara meningkatkan keramahan, kesopanan dan efisiensi waktu supaya warga tidak perlu menunggu terlalu lama dalam menerima pelayanan yang dibutuhkan;
2. Mengusulkan penambahan staf ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan Kantor Kecamatan Sigaluh;
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana juga tata ruang kantor yang ada sekarang untuk mendukung kinerja dan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sigaluh Tahun 2023. Laporan ini masih jauh dari yang diharapkan, untuk itu kami membuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Akhirnya kami berharap LKjIP ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Sigaluh, 06 Januari 2024

Plt. CAMAT SIGALUH

ANTON RISDIANTO, S.STP.,MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19780221 199803 1 003